

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. Jakarta PT. Rajagarfindo Persada.

Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Pena Hikmah.

Tan Malaka, 2016, *Massa Aksi*, Bandung: Segarsy.

Willy D.S. Voll, 2013, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roma K Smith et al , 2009, *Hukum HAM* , Yogyakarta : Pusham UII.

Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.

T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa.

Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

LBH Yogyakarta 2017, *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*, Yogyakarta: BEST LINE PERSS.

Abdy Yuhana, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Bandung, Fokus media.

Rafael Raga Maran, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.

M. Khoidin Sadjijono, 2007 *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta : Laksbang.

Soebroto Brotodiredjo, 1984, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, menyongsong Undang- Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, Jakarta : PTIK.

Indera Nababan, 2001, *Gerakan Rakyat Merambat Karena Dihambat*, Jakarta : URM – Indonesia.

Pangabean, R., dan Ali Fauzi, 2014, *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*, Jakarta pusat paramadina.

Tabah, A. 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Simon, R. 2001, *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Tribowo, D. 2006, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Jakarta: Pustaka LP3ESI.

Jurnal :

Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, 2016.

Ujang Chandra S, “Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Vol 3 No 1, 2017.

Kusniati, R, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 5, 2011.

Guntur Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 1, No 1, 2016.

Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4 No 1, 2005.

Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis* Vol.12 No.1, 2016.

Legowo Saputro, "Direksi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Kertahanan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 21 No. 2, 2015.

Osgar S Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam keadaan Prespektif Darurat", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No.1, 2014.

Suharko, "Gerakan sosial Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.10 No. 1, 2006.

Dewi Kartika Sari dan Royke R., Siahainenya, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 12 No. 1, 2015.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Lain-lain :

Emanuel Gobay, "Manajerial Aksi", Yogyakarta, 06 Mei 2018.

Wawancara : Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H. Sleman 02 Oktober 2018.

Wawancara :Tirta Kencana, Korban atas penangkapan massa aksi tolak kenaikan BBM di Simpang Tiga Jl Laksda Adisucipto. Yogyakarta 10 Oktober 2018.

Data: Dir. Intelkam Polda DIY, Rekapitulasi Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polda DI.Yogyakarta Tahun 2015-September 2018.

Internet :

Kemdikbud, 07 Desember 2017, http://ban-pt.kemdikbud.go.id/hasil_aipt.php, (08.30).